



Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya Periode 2022–2024

Amilia Setiyawati¹, Vanny Rezky Pratiwi², Elza Mariska³, Adha Sagita Sari⁴, Subaidah⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika^{1,2,3,4,5}

*Email 63230350@bsi.ac.id¹, 63231157@bsi.ac.id², 63230106@bsi.ac.id³, 63230182@bsi.ac.id⁴, 63230200@bsi.ac.id⁵

Diterima: 05-07-2026 | Disetujui: 12-07-2026 | Diterbitkan: 14-07-2026

ABSTRACT

The implementation of performance-based budgeting in the government sector aims to increase transparency, accountability, and effectiveness of state financial management so that every budget allocation is oriented towards measurable performance achievements. However, local government budget management practices in Indonesia still show various problems in terms of efficiency and effectiveness. This study evaluates the level of economy, efficiency, and effectiveness of budget management in the Surabaya City Government for the 2022–2024 period through a Value for Money approach. This study uses a qualitative and descriptive methodology with additional information in the form of the Budget Realization Report (LRA) and the Surabaya City Regional Government Financial Report (LKPD). Data analysis was conducted through the calculation of economic ratios, efficiency ratios, and effectiveness ratios. The results of this study indicate that the economic ratio has been below 100% for three consecutive years (88.83%; 88.19%; 86.94%), thus categorizing it as economical. The efficiency ratio ranges from 99.36%–107.47% and is categorized as less efficient to inefficient. The effectiveness ratio ranges from 88.78%–89.56% and is categorized as quite effective. Overall, the implementation of performance-based budgeting in the Surabaya City Government has met economic and effective standards. However, improvements in efficiency are still needed to ensure optimal implementation of the Value for Money principle.

Keywords: Performance-Based Budgeting, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness

ABSTRAK

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada sektor pemerintahan bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan negara agar setiap penggunaan anggaran berorientasi pada capaian kinerja yang terukur. Namun demikian, praktik pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan berbagai permasalahan dalam aspek efisiensi dan efektivitas. Studi ini mengevaluasi tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran pada Pemerintah Kota Surabaya periode 2022–2024 melalui pendekatan Value for Money. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan deskriptif dengan informasi tambahan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Surabaya. Analisis data dilakukan melalui perhitungan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan juga rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio ekonomis berada di bawah 100% selama tiga tahun berturut-turut (88,83%; 88,19%; 86,94%) sehingga dikategorikan ekonomis. Rasio efisiensi berkisar antara 99,36%–107,47% dan termasuk kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Rasio efektivitas berkisar antara 88,78%–

89,56% dan termasuk kategori cukup efektif. Secara keseluruhan, implementasi anggaran dengan berbasis kinerja pada daerah Pemerintah Kota Surabaya telah memenuhi aspek ekonomis dan cukup efektif, tetapi aspek efisiensi masih memerlukan perbaikan agar prinsip Value for Money dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Setiyawati, A., Pratiwi, V. R. ., Mariska, E. ., Sari, A. S. ., & Subaidah, S. (2026). Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya Periode 2022–2024. *Indonesia Economic Journal*, 2(2), 1902-1911. <https://doi.org/10.63822/3sbbmp81>

PENDAHULUAN

Penerapan anggaran berbasis kinerja pada sektor pemerintahan adalah salah satu strategi guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan negara. Melalui sistem ini, penggunaan anggaran diarahkan pada pencapaian target kinerja yang terukur sehingga tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran berbasis kinerja diharapkan mampu mendukung penerapan prinsip Value for Money yang melibatkan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Meskipun demikian, pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan adanya potensi pemborosan belanja daerah sebesar Rp141 triliun yang disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan anggaran (detikfinance, 2024). Sebaliknya, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinilai mampu menekan potensi pemborosan APBN maupun APBD hingga Rp128,5 triliun melalui peningkatan efektivitas program dan efisiensi belanja pemerintah (ANTARAPAPUATENGAH, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja masih memerlukan evaluasi agar prinsip Value for Money dapat diterapkan secara lebih optimal.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian (Suridiyanti et al., 2024) menunjukkan bahwa implementasi value for money belum optimal karena aspek efektivitas masih rendah. Penelitian (Mursalini & Indrawati, 2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam aspek efektivitas dan efisiensi. Sebaliknya, penelitian (Wahyuni, 2023) menemukan bahwa pengelolaan anggaran telah menunjukkan tingkat ekonomis dan efisiensi yang baik. Perbedaan hasil penelitian tersebut menjadi gap penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut pada objek yang berbeda.

Pemerintah Kota Surabaya dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki realisasi APBD yang tinggi serta memperoleh capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi anggaran berbasis kinerja menggunakan pendekatan Value for Money berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya periode 2022–2024 yang masih jarang dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana tingkat ekonomis pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya; (2) bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya; dan (3) bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan prinsip Value for Money. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan Value for Money. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya serta menjadi referensi bagi penelitian akuntansi di bidang sektor publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Dalam sektor publik, akuntansi berperan sebagai sistem yang digunakan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan berbagai transaksi keuangan sehingga

menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (Belinda & Costari, 2021). Selain berfungsi sebagai alat untuk pertanggungjawaban keuangan, data akuntansi sektor publik juga digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Dengan demikian, data ini berfungsi sebagai dasar untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja mengatur pengeluaran berdasarkan apa yang akan dilakukan, di mana dokumen pelaksanaan anggaran harus memuat indikator dan tujuan kinerja yang diharapkan untuk dicapai pada suatu kegiatan atau program dengan dana yang dialokasikan (Situmorang et al., 2024). Anggaran berbasis kinerja disusun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik, mendorong akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja (Hidayah et al., 2025).

Value for Money

Value for money merupakan ide tentang bagaimana kinerja suatu organisasi pemerintah diukur lewat melihat input (masukan) dan output (hasil). Konsep ini penting dalam sektor publik karena pemerintah dituntut menggunakan dana masyarakat secara bertanggung jawab dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Value for money memiliki tiga indikator utama, yaitu diantaranya:

- a. Ekonomis — merupakan kondisi yang menunjukkan adanya hubungan antara input dan juga output dengan prinsip penggunaan sumber daya secara hemat, tepat, dan sesuai kebutuhan (Makmur, 2022).
- b. Efisiensi — kemampuan untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai.
- c. Efektivitas — merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai melalui pelaksanaan suatu kegiatan (Sitta Inka Putri Mamonto, Ismail Rachman, 2022).

Penelitian Terdahulu

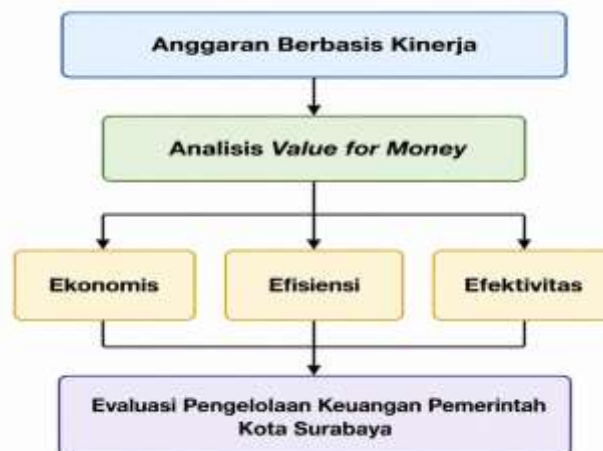
Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Wahyuni (2023)	Analisis Value for Money pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Ekonomis dan efisien, namun efektivitas perlu ditingkatkan
2	Mursalini & Indrawati (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendekatan Value for Money	Efektivitas dan efisiensi belum optimal
3	Suridiyanti et al. (2024)	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Prinsip value for money belum sepenuhnya tercapai

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
4	Prameswari et al., (2025)	Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money di Kota Pekalongan (Tahun 2021–2022)	Pendekatan Value for Money dapat digunakan untuk efisiensi, efektivitas, dan tingkat ekonomis dari manajemen keuangan daerah secara komprehensif

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada implementasi anggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan Value for Money pada Pemerintah daerah Kota Surabaya tahun 2022–2024. Implementasi anggaran berbasis kinerja diukur melalui pencapaian prinsip Value for Money yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil pengukuran ketiga aspek tersebut digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pengelolaan anggaran daerah serta mengetahui apakah penggunaan anggaran telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan menggunakan deskriptif guna mengkaji kondisi sebenarnya mengenai implementasi anggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan prinsip Value for Money pada Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2022–2024. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada penggambaran dan evaluasi kondisi yang terjadi di lapangan, tanpa melakukan pengujian hubungan maupun pengaruh antarvariabel. Penilaian dilakukan melalui analisis terhadap indikator ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebagai ukuran keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja (Natalia H.M. Rengkuhan, Daud M. Liando, 2023).

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan untuk menilai implementasi anggaran berbasis kinerja periode 2022–2024. Data yang dianalisis merupakan data tambahan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta

berbagai referensi berupa buku, artikel ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya yang terkait. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Value for Money, dengan menghitung rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan data dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya tahun 2022–2024, kemudian hasil perhitungan diinterpretasikan berdasarkan kriteria penilaian pada Tabel 2, 3, dan 4 untuk menarik kesimpulan.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
< 100%	Ekonomis
= 100%	Berimbang
> 100%	Tidak Ekonomis

$$\text{Rasio Ekonomis} = (\text{Realisasi Belanja} \div \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

Persentase	Kriteria
< 60%	Sangat Efisien
60% – 80%	Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
> 100%	Tidak Efisien

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Belanja} \div \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

$$\text{Rasio Efektivitas} = (\text{Realisasi Pendapatan} \div \text{Target Pendapatan}) \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Pemerintah Kota Surabaya adalah salah satu pemerintah di daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pembiayaan program dan kegiatan pembangunan. Sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah Kota Surabaya menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah lewat perbandingan antara dana anggaran dan dana realisasi.

Analisis Rasio Ekonomis

Tabel 5. Perhitungan Rasio Ekonomis Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2024

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Ekonomis	Kriteria
2022	10.636.827.593.321	9.448.236.778.683	88,83%	Ekonomis
2023	10.821.334.252.595	9.543.590.902.934	88,19%	Ekonomis
2024	11.500.368.580.693	9.998.040.835.382	86,94%	Ekonomis

Rasio ekonomis Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2022–2024 secara konsisten berada di bawah 100%, yaitu 88,83% (2022), 88,19% (2023), dan 86,94% (2024). Hasil tersebut menunjukkan realisasi belanja daerah selalu lebih rendah dibanding dengan anggaran yang ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat dikategorikan hemat dan sesuai kebutuhan. Kecenderungan penurunan rasio dari tahun ke tahun mengindikasikan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran, sehingga dari aspek ekonomis implementasi anggaran berbasis kinerja telah berjalan dengan baik.

Analisis Rasio Efisiensi

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2024

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2022	8.791.308.679.482	9.448.236.778.683	107,47%	Tidak Efisien
2023	9.604.779.764.405	9.543.590.902.934	99,36%	Kurang Efisien
2024	10.034.448.255.551	9.998.040.835.382	99,64%	Kurang Efisien

Rasio efisiensi menunjukkan hasil yang berfluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2022 rasio efisiensi mencapai 107,47% (tidak efisien) karena belanja yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan yang diperoleh. Rasio membaik menjadi 99,36% pada tahun 2023 dan 99,64% pada tahun 2024, namun keduanya masih berada pada kategori kurang efisien karena selisih antara realisasi pendapatan dan belanja relatif kecil. Secara keseluruhan, aspek efisiensi masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya sehingga diperlukan pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan daerah agar hasil pengelolaan keuangan lebih maksimal.

Analisis Rasio Efektivitas

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022–2024

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2022	9.822.403.087.674	8.791.308.679.482	89,50%	Cukup Efektif
2023	10.723.824.846.149	9.604.779.764.405	89,56%	Cukup Efektif
2024	11.302.418.432.963	10.034.448.255.551	88,78%	Cukup Efektif

Rasio efektivitas Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2022–2024 berada pada kategori cukup efektif, yaitu 89,50% (2022), 89,56% (2023), dan 88,78% (2024). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target pendapatan berhasil direalisasikan, namun masih terdapat selisih antara target dan realisasi pendapatan setiap tahunnya, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan daerah tergolong cukup baik namun masih memerlukan peningkatan agar target dapat tercapai secara optimal.

Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan Value for Money

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Analisis Value for Money Tahun 2022–2024

Indikator	2022	2023	2024	Keterangan
Ekonomis	88,83%	88,19%	86,94%	Ekonomis
Efisiensi	107,47%	99,36%	99,64%	Belum Efisien Optimal
Efektivitas	89,50%	89,56%	88,78%	Cukup Efektif

Berdasarkan hasil analisis Value for Money, implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah daerah Kota Surabaya selama periode 2022–2024 menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek ekonomis, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mempertahankan rasio di bawah 100% selama tiga tahun berturut-turut, yang menunjukkan penggunaan anggaran secara hemat dan sesuai kebutuhan program. Dari aspek efisiensi, pengelolaan keuangan daerah masih berada pada kategori kurang efisien dengan rasio berkisar 99%–107%, sehingga penggunaan sumber daya keuangan

belum sepenuhnya optimal. Sementara itu, dari aspek efektivitas, rasio berkisar antara 88%–89%, yang menunjukkan bahwa target pendapatan daerah belum sepenuhnya tercapai meskipun realisasi telah mendekati target.

Secara keseluruhan, implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Surabaya telah memenuhi aspek ekonomis dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik. Namun demikian, aspek efisiensi masih perlu ditingkatkan agar prinsip Value for Money dapat diwujudkan secara lebih optimal, antara lain melalui penyempurnaan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja sehingga penggunaan anggaran tidak hanya ekonomis, tetapi semakin efisien dan juga efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tingkat ekonomis pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Surabaya periode 2022–2024 berada dalam kategori ekonomis, dengan rasio ekonomis sebesar 88,83% (2022), 88,19% (2023), dan 86,94% (2024) yang seluruhnya berada di bawah standar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara hemat, terencana, dan sesuai kebutuhan.

Tingkat efisiensi pengelolaan anggaran masih belum optimal. Rasio efisiensi pada tahun 2022 sebesar 107,47% (tidak efisien), kemudian menjadi 99,36% pada 2023 dan 99,64% pada 2024 (kurang efisien). Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan daerah masih memerlukan peningkatan melalui perencanaan anggaran yang lebih baik dan penguatan pengawasan pelaksanaan belanja.

Tingkat efektivitas pengelolaan anggaran berada pada kategori cukup efektif, dengan rasio sebesar 89,50% (2022), 89,56% (2023), dan 88,78% (2024). Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai sasaran pendapatan daerah sudah berjalan cukup baik, namun potensi penerimaan daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Surabaya periode 2022–2024 telah mendukung penerapan prinsip Value for Money, khususnya pada aspek ekonomis dan efektivitas, meskipun aspek efisiensi masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Saran

Pertama, Pemerintah Kota Surabaya disarankan untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran melalui penguatan pengendalian realisasi belanja, penetapan skala prioritas program secara lebih selektif, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kedua, Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan efektivitas pencapaian target pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sistem pengelolaan pajak dan juga retribusi daerah, serta penyusunan target pendapatan yang lebih akurat dan realistis. Ketiga, perlu peningkatan kualitas sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang didanai APBD secara berkala berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keempat, bagi peneliti selanjutnya dapat diberi saran untuk memperluas cakupan objek penelitian atau periode pengamatan, serta menambahkan variabel lainnya seperti tingkat

akuntabilitas, kualitas tata kelola pemerintahan, atau capaian SAKIP guna memperkaya kajian akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARAPAPUATENGGAH. (2025). *Reformasi Birokrasi cegah pemborosan anggaran Rp128,5 triliun*. Papuatengah.Antaranews.Com. <https://papatengah.antaranews.com/berita/64129/reformasi-birokrasi-cegah-pemborosan-anggaran-rp1285-triliun>
- Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). *INSTANSI PEMERINTAHAN*. 1(1), 58–77.
- detikfinance. (2024). *BPKP Temukan Pemborosan Belanja Daerah Rp 141 T*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7626553/bpkp-temukan-pemborosan-belanja-daerah-rp-141-t>
- Hidayah, N., Pattiasina, V., Utami, F. L., Temalagi, S., Monalika, H. P., & Amalina, N. (2025). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Tantangan, dan Digitalisasi*. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=VzaleQAAQBAJ>
- Makmur, A. A. R. (2022). *Analysis of Value for Money and Accountability in Improving Public Services At The Makassar City Water Corporation*. 2(2), 87–103.
- Mursalini, W. I., & Indrawati, N. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok)*. 7(1), 26454–26465.
- Natalia H.M. Rengkuan, Daud M. Liando, D. K. M. (2023). *Efektifitas Kinerja Pemerintah Dalam Progam Reaksi Respon Realief Daerah (R3D) Di Kabupaten Minahasa*. 3(1), 1–11.
- Prameswari, M. P., Safitri, R. A., Karima, N., & Gunawan, A. (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Sektor Publik dengan Pendekatan Value for Money di Kota Pekalongan (Tahun. 1, 1–13*.
- Sitta Inka Putri Mamonto, Ismail Rachman, N. K. (2022). *Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu (Studi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu) Sitta*. 2(1), 1–14.
- Situmorang, D. D. P., Erlina, & Sirojuzilam, L. R. R. R. (2024). *Faktor -- Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Daerah Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Penerbit Adab. <https://books.google.co.id/books?id=8frxEAAAQBAJ>
- Suridiyanti, W. A., Akuntansi, D., Hasanuddin, U., Akuntansi, D., Hasanuddin, U., Akuntansi, D., & Hasanuddin, U. (2024). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money*. October 2023, 82–96. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28368>
- Wahyuni, A. (2023). *PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY (STUDI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA 2020-2022)*. 4(6), 11393–11398.